

## REKONSTRUKSI SEJARAH KERAJAAN SUNDA

**Nina Herlina**

Guru Besar Ilmu Sejarah di Departemen Sejarah & Filologi Universitas Padjadjaran

E-mail : nina.herlina@unpad.ac.id

**ABSTRAK.** Kerajaan Sunda eksis selama delapan abad, dari abad ke-8 hingga abad ke-16. Sumber-sumber sejarah yang berisi informasi tentang Kerajaan Sunda bersifat fragmentaris dan terdiri dari berbagai jenis sumber baik berupa prasasti, naskah kuno maupun berita asing. Yang dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana informasi yang beragam itu dikoroborasikan untuk menghasilkan suatu rekontruksi kisah sebuah kerajaan yang kronologis. Untuk itu dilakukan penelitian menggunakan metode sejarah yang terdiri atas empat tahap yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Untuk memberikan eksplanasi tentang riwayat Kerajaan Sunda yang berisi informasi yang jelas, kronologis, diperlukan pendekatan yang bersifat multidimensi, selain dari aspek politik, juga diperlukan pendekatan ekonomi dan sosial. Dengan pendekatan seperti ini dapat disusun rekonstruksi Kerajaan Sunda, sebuah Kerajaan Hindu, sejak berdirinya pada abad ke-8 yang ternyata berhubungan dengan Kerajaan Galuh di Kawali. Kedua Kerajaan pernah dipersatukan melalui perkawinan politik, hingga mencapai masa keemasan pada masa Sri Baduga Maharaja memerintah dan kemudian hancur pada tahun 1579 akibat faktir internal yaitu melemahnya kepemimpinan Raja Sunda dan factor eksternal yaitu serbuan Kesultanan Banten yang beragama Islam selama setengah abad.

**Kata Kunci :** Kerajaan Sunda; Kerajaan Galuh; pendekatan multidimensi; koroborasi, eksplanasi.

### HISTORICAL RECONSTRUCTION OF THE SUNDA KINGDOM SUNDA

**ABSTRACT.** *The Sunda Kingdom existed for eight centuries, from the 8th to the 16th century. Historical sources about the Sunda Kingdom—such as monuments, old manuscripts, and written accounts—are fragmented. This article examines how information from these various sources can be corroborated to reconstruct a chronological historical narrative of the kingdom. This process requires a study that follows a four-step historical method: heuristic, critical, interpretive, and historiographic. A multidimensional approach is essential to develop a clear and coherent chronological explanation, combining social, political, and economic perspectives. Through this approach, a historical reconstruction of the Sunda Kingdom emerges, portraying it as a Hindu kingdom that, since its establishment in the 8th century, formed ties with the Galuh Kingdom in Kawali. Both kingdoms entered a political union and reached their golden age during the reign of Sri Baduga Maharaja. The Sunda Kingdom ultimately ended in 1579 due to internal factors like weak leadership and external pressures from the Islamic Sultanate of Banten, which had been attacking the kingdom for over half a century.*

**Keywords:** *Sunda Kingdom; Galuh Kingdom; multidimensional approach; corroboration, explanation*

### PENDAHULUAN

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber dapat diketahui informasi awal tentang Kerajaan Sunda. Menjelang Kerajaan Tarumanegara berakhir pada abad ke-7, di sebelah Barat Sungai Citarum sudah ada Kerajaan Sunda, Kerajaan Saunggalah di Kuningan yang berlokasi di Kabupaten Kuningan sekarang, dan Kerajaan Galuh yang berlokasi di Kabupaten Ciamis sekarang. Dalam *Carita Parahyangan*, dikisahkan tentang Sanjaya, putera Sena, Raja di Galuh. Sanjaya naik tahta setelah mengalahkan Rahyang Purbasora yang telah merebut tahta dari ayahnya. Menurut informasi dalam Prasasti Canggal, Sanjaya memerintah sekitar tahun 732 M.

Berdasarkan informasi dalam naskah Kropak 406 atau yang dikenal sebagai naskah *Fragmen Carita Parahyangan*, Sanjaya kemudian menjadi menantu Raja Sunda, Maharaja

Trarusbawa, pendiri Kerajaan Sunda Pakuan Pajajaran yang berhasil melepaskan diri dari Kerajaan Tarumanegara. Setelah Maharaja Trarusbawa meninggal, tahta Kerajaan Pakuan jatuh ke tangan Sanjaya sehingga kedua kerajaan (Pakuan dan Galuh) dapat dipersatukan dan dikenal sebagai Kerajaan Sunda. Namun, Sanjaya yang juga dikenal sebagai Maharaja Harisdarma, lebih memilih tinggal di Galuh.

Pada masa Raja Sanjaya bertahta di Galuh, mungkin terjadi konflik internal sehingga Raja Sanjaya melepaskan jabatannya sebagai Raja Galuh, dan pergi ke Mataram yang berkedudukan di Jawa Tengah bagian Selatan dan ia menjadi raja di sana. Selanjutnya Sanjaya mengeluarkan prasasti Canggal (732 M) sebagaimana telah dikemukakan. Setelah Mataram berkembang, Galuh kembali memisahkan diri dan berkembang sendiri.

Sementara itu, ibukota Kerajaan Sunda di Pakuan Pajajaran (Bogor) tetap menjadi salah

satu kota besar Kerajaan Sunda dengan raja sendiri. Buktinya, dalam prasasti Sanghyang Tapak (1030 M), disebutkan tentang Sri Jayabhupati dari Kerajaan Prahajyan Sunda membuat “daerah larangan” di Sanghyang Tapak. Ekadjati (1984: 83) mengidentikan Sri Jayabhupati dengan Sang Rakeyan Darmasiksa yang disebut dalam beberapa naskah Sunda kuna, termasuk dalam *Carita Parahyangan* (Atja, 1981: 34). Berdasarkan perbandingan beberapa naskah kuna, Ekadjati menyebutkan bahwa Ayah Darmasiksa, yaitu Sang Lumahing Winduraja adalah keturunan Raja-raja Sunda, tetapi ibunya berasal dari keturunan raja-raja di Jawa Timur (Lokapala). Darmasiksa dibesarkan di Jawa Timur. Ketika di Jawa Timur terjadi peristiwa “pralaya” yang menimpa keluarga Raja Dharmawangsa pada tahun 1017, Darmasiksa kembali ke kampung halaman ayahandanya. Semula ia menjadi raja di Saunggalah Kuningan, kemudian pindah ke Pakuan Pajajaran menjadi Raja Sunda (1030). Pada masa menjadi Raja Sunda inilah, Sri Jayabhupati mengeluarkan prasasti yang menyatakan bahwa ia adalah Raja Sunda yang memuja Sanghyang Tapak (Ekadjati, 1984: 83).

Informasi tentang awal Kerajaan Sunda tampak bersifat fragmentaris, potongan-potongan informasi yang harus dirangkai dengan dugaan atau perkiraan. Hal ini yang menarik untuk diteliti. Untuk merekonstruksi Kerajaan Sunda tidak bisa dilakukan dengan pendekatan historis saja. Eksplanasi bisa didapatkan dengan menelusuri sumber terkait hubungan dengan kerajaan lain, juga dicari perkembangan ekonomi, dalam hal ini perdagangan dengan bangsa asing khususnya Portugis yang pada abad ke-16 berjaya dalam perdagangan internasional.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan, yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi (Garraghan, 1957; Gottschalk, 1968). Tahap pertama, heuristik yaitu menelusuri dan menghimpun sumber sejarah yang relevan dengan pokok masalah yang diteliti. Untuk memperoleh sumber yang otentik, dilakukan kritik eksternal sedangkan untuk memperoleh sumber yang kredibel, dilakukan kritik internal. Untuk memperoleh fakta sejarah, data yang sudah melalui tahap kritik, dikoroborasi dengan sumber pembanding yang tidak saling berkaitan. Fakta tersebut kemudian diinterpretasi, baik secara analisis maupun sintesis. Rangkaian fakta yang telah diinterpretasi

secara logis, kemudian direkonstruksi menjadi historiografi tentang Kerajaan Sunda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Informasi awal tentang Kerajaan Sunda, yang dipaparkan dalam bagian Pendahuluan, lebih jelas ketika pusat Kerajaan Sunda beralih kembali ke Galuh. Pada pertengahan abad ke-14, dalam prasasti Kawali disebutkan Prabu Wastu yang bertahta di Kota Kawali memperindah keraton Surawisesa dan membuat parit di sekeliling ibukota. Dalam *Carita Parahyangan* dan juga dalam prasasti Kebantenan, Prabu Wastu ini dikenal sebagai Rahyang Niskala Wastu-kancana. Dikisahkan bahwa ayahanda Prabu Wastu, adalah Prabu Maharaja yang gugur di Bubat pada tahun 1357, ketika mengantarkan puterinya, Dyah Pitaloka, yang semula akan dinikahi Prabu Hayam Wuruk, Raja Majapahit.

Menurut naskah *Carita Parahyangan*, ketika Prabu Maharaja gugur di Bubat, Wastukancana masih kecil untuk menduduki tahta sehingga diangkatlah Hyang Bunisora sebagai wali raja. Baru pada tahun 1371 Prabu Wastukancana naik tahta, yang berlangsung selama 104 tahun (1371-1475).

Selanjutnya, Prabu Wastukancana digantikan oleh Dewa Niskala dan ketika Dewa Niskala meninggal, ia digantikan oleh putranya yang bernama Sri Baduga Maharaja, yang berkedudukan di Pakuan Pajajaran. Jadi, Sri Baduga bukan saja berkuasa di Kawali, tempat kedudukan ayah dan kakeknya, ia juga berkuasa di Pakuan Pajajaran. Dengan demikian kedua pusat kekuasaan bergabung di bawah kendalinya. Sebagaimana dinyatakan dalam prasasti Batutulis (1533 Masehi), yang dibuat 12 tahun setelah Sri Baduga meninggal. Raja Sunda yang dikenal juga dengan nama Sang Ratu Jayadewata, Prabu Guru Dewataprana, Prabu Ratu Purana atau Sang Ratu Dewata yang kemudian dikenal sebagai Prabu Siliwangi ini, memerintah berdasarkan kitab-kitab hukum yang berlaku sehingga keadaan aman, tenteram, tanpa pernah terjadi peperangan. Selain itu, Sri Baduga banyak berbuat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya yaitu memariti lagi kota, memperkeras jalan, membuat hutan tutupan, membuat tanda peringatan gunung-gunungan, dan membuat danau bernama Talaga Rena Mahawijaya. Setelah meninggal ia dikenal sebagai *sang mokteng ranca-maya* ‘Yang meninggal di Rancamaya’. Mengenai masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja dapat diperhitungkan antara 1482-1521.

Dalam buku *Summa Oriental*, yang berisi catatan perjalanan Tome Pires ke Banten dan beberapa tempat lain di Nusantara, disebutkan bahwa pada tahun 1512-1513 itu, Kerajaan Sunda memiliki kota-kota pelabuhan yaitu *Bantam* (Banten), *Pomdam* (Pontang), *Cheguide* (Cikande), *Tamgaram* (Tangerang), *Calapa* (Kalapa), dan *Chemano* (Cimanuk) (Heuken, 1999 (I) : 37). Hal ini menunjukkan bahwa langkah Sri Baduga Maharaja memindahkan ibukota dari Kawali ke Pakuan Pajajaran tidaklah salah.

Ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, para pedagang muslim tidak mau lagi singgah di sana. Mereka mengalihkan jalur perdagangan-nya menggunakan rute Aceh-Pantai Barat Sumatera - Selat Sunda - Pesisir Utara Pulau Jawa - Nusa Tenggara - Maluku yang lebih aman. Pelabuhan-pelabuhan yang terdapat di sepanjang Pesisir Utara Kerajaan Sunda menjadi ramai. Namun Sang Ratu Jayadewata, Raja Sunda yang beragama Hindu, merasa khawatir karena pengaruh Islam semakin besar. Untuk mengantisipasi, Raja Sunda berusaha untuk membatasi pedagang muslim yang akan singgah di pelabuhan-pelabuhan milik Kerajaannya. Namun usahanya ini sulit dilaksanakan, para pedagang muslim tetap saja meramaikan pelabuhan-pelabuhannya. Oleh karena itulah, Kerajaan Sunda memilih untuk mengadakan koalisi dengan Portugis di Malaka (Hall, 1988: 214).

Untuk mewujudkan persahabatan tersebut, pada 1512 Sang Ratu Jayadewata (Poesponegoro dan Notosusanto, 1990<sup>2</sup>: 369). mengirim beberapa utusannya ke Malaka di bawah pimpinan Ratu *Samiam* (Sangiang) (Atja, 1968: 75-76). Mereka menawarkan kepada penguasa Portugis di Malaka untuk melakukan perdagangan secara bebas di pelabuhan-pelabuhan milik Kerajaan Sunda. Sebagai imbalannya, Ratu Sangiang mengharapkan bantuan militer dari Portugis apabila Kerajaan Sunda diserang oleh Kerajaan Demak-Cirebon (Hageman, 1867: 210).

Pada bulan Maret-Juni 1513, Alfonso d'Albuquerque (penguasa Malaka) mengirim empat buah kapal untuk melakukan ekspedisi ke Pesisir Utara Pulau Jawa. Ekspedisi ini bertujuan untuk membuktikan informasi yang disampaikan oleh Ratu Sangiang berkenaan dengan peranan pelabuhan-pelabuhan di pesisir utara Pulau Jawa dalam jalur perdagangan di Nusantara. Mereka kemudian menyinggahi beberapa pelabuhan milik Kerajaan Sunda dan menyaksikan betapa ramainya pelabuhan-pelabuhan tersebut disinggahi oleh para pedagang dari berbagai bangsa.

Meskipun para pedagang Portugis belum dapat diterima sepenuhnya oleh para pedagang

dan syahbandar yang telah dipengaruhi oleh Islam, namun mereka tetap melakukan aktivitas perdagangan di pelabuhan-pelabuhan pesisir utara Kerajaan Sunda.

Meskipun kedua belah pihak telah melakukan kunjungan, namun persahabatan antara Kerajaan Sunda dan Portugis belum dapat direalisasikan. Oleh karena itu, pada tahun 1521 Sang Ratu Jayadewata kembali mengirim Ratu Samiam dan beberapa orang utusan lainnya untuk menemui Portugis di Malaka. Tugas utamanya adalah untuk sesegera mungkin merealisasikan hubungan persahabatan dengan Portugis. Rupanya, utusan kedua ini berhasil meyakinkan penguasa Portugis bahwa persahabatan yang diinginkan oleh Kerajaan Sunda akan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Hal tersebut dapat dilihat dari keputusan penguasa Malaka Jorge d'Albuquerque, untuk mengirim utusan resminya di bawah pimpinan Henrique de Leme. Misi utama dari utusan ini adalah menjajagi bagi suatu perjanjian politik antara Kerajaan Sunda dan Portugis. Utusan ini berangkat ke Kerajaan Sunda pada tahun 1522 dengan membawa berbagai hadiah untuk Raja Sunda (Hageman, 1867: 210).

Kunjungan Henrique de Leme ke Kerajaan Sunda menghasilkan sebuah perjanjian politik antara Kerajaan Sunda dan Portugis yang ditandatangani pada 21 Agustus 1522. Isinya antara lain, Portugis bersedia membantu Kerajaan Sunda apabila diserang oleh Kerajaan Demak atau kerajaan lainnya. (Djajadiningrat, 1913: 73-74; Hageman, 1867: 209-211).

Ketika serbuan Demak datang, bantuan Portugis ternyata tidak kunjung datang dan Surawisesa terpaksa berperang sendiri melawan pasukan muslim. Selama pemerintahannya itu, menurut *Carita Parahyangan* ia berperang sebanyak lima belas kali dan tidak pernah kalah. Ia berperang ke Kalapa, Tanjung, Ancol Kiji, Wahanten Girang, Simpang, Gunung Batu, Saung Agung, Rumbut, Gunung Banjar, Padang, Panggaokan, Muntur, Hanum, Pagerwesi, dan Medangkahyangan. Raja ini harus mengalami peperangan lagi dan akhirnya meninggalkan ibu kota. Usaha-usaha Prabu Surawisesa tidak dapat membendung pengaruh Islam yang semakin besar. Terlebih ketika Banten dan Sundakalapa jatuh ke tangan pasukan gabungan Demak dan Cirebon, pada tahun 1526 dan 1527. Dengan jatuhnya kedua pelabuhan utama ini, Pusat Kerajaan Sunda terisolir dari dunia luar, dan jalan dagang yang dikuasai Kerajaan Sunda terblokir. Ketika pasukan Portugis yang dijanjikan datang pada tahun 1527 di Sundakalapa, ternyata ia harus berhadapan dengan pasukan muslim di

bawah pimpinan Fatahillah. Portugis pun berhasil dipukul mundur. Pelabuhan Sundakalapa pun diganti nama menjadi "Jayakarta" yang berarti "kota kemenangan".

Faktor luar yang mengakibatkan kehancuran Kerajaan Sunda, ternyata ditambah dengan faktor dari dalam negeri. Pengganti Prabu Surawisesa, yaitu Prabu Ratudewata (1535-1543) memilih hidup sebagai raja pendeta untuk menghindari dari kekacauan di dalam negeri atau menghadapi serangan luar. Namun serangan Banten berjalan terus, bahkan pada masa ini diberitakan jatuh korban petinggi kerajaan yaitu Tohaan Sarendet dan Tohaan Ratu Sanghyang (Ayatrohaedi, 1977: 70-71). Peperangan berhenti sementara pada masa pemerintahan, Sang Mangabatan atau Ratu Saksi (1543-1551) karena pada tahun 1546 pasukan gabungan Islam dari Banten, Cirebon, dan Demak dikerahkan untuk menaklukkan Pasuruan. Ratu Saksi ini berperangai buruk. Ia sering membunuh orang tanpa dosa, merampas harta rakyatnya, tidak hormat kepada yang lebih tua, sering menghina kaum pendeta dan suka main perempuan. Ratu Saksi meninggal di Pengpelangan dan digantikan oleh Tohaan di Majaya atau Prabu Nilakendra (1551-1567). Dikisahkan bahwa Raja Nilakendra ini lebih suka bersenang-senang, menyebar maksiat, mabuk-mabukan, makan makanan yang serba lezat daripada menunaikan kewajibannya sebagai raja (Atja, 1981: 38).

Raja Sunda terakhir yaitu Nusiya Mulya (1567-1579) ternyata tidak dapat mempertahankan kerajaannya. Pasukan gabungan Demak, Cirebon dan Banten berhasil memenangkan berbagai pertempuran dan wilayah kekuasaan Kerajaan Sunda seperti Rajagaluh, Kalapa, Pakwan, Galuh, Datar, Mandiri, Jawa-kalapa, Gegelang, dan Salajo jatuh ke tangan Banten (Pleyte, 1911: 181). Kerajaan Sunda yang berpusat di Pakwan Pajajaran benar-benar berakhir pada tahun 1579 M. karena serangan dari Kesultanan Banten di bawah pemerintahan Maulana Yusuf (Djajadiningrat, 1913).

## SIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa Kerajaan Sunda sudah ada sejak abad ke-8 berpusat di sekitar Bogor sekarang. Raja Sanjaya dari Galuh (Ciamis sekarang) pernah mempersatukan kerajaannya dengan Kerajaan Sunda dengan melakukan perkawinan politik dengan puteri Raja Sunda. Namun penggabungan dua kerajaan Hindu itu tidak berlangsung lama karena Sanjaya lebih

memusatkan kekuasaannya di Galuh. Tidak mengherankan bila selama beberapa abad, eksistensinya seakan tenggelam dan Kerajaan Sunda baru mencapai keemasannya ketika Sri Baduga Maharaja cucu Prabu Wastukencana dari Galuh, yang digelar sebagai Prabu Siliwangi, memusatkan kekuasaannya di Kerajaan Sunda (1481-1522). Pada masa kekuasaan putranya, Prabu Surawisesa, Kerajaan Sunda mengadakan aliansi dengan Portugis ketika menghadapi ancaman Kerajaan Islam, Demak dan kemudian Banten. Karena melemahnya kepemimpinan internal dan serbuan eksternal dari Kesultanan Banten, Kerajaan Sunda runtuh pada tahun 1579.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atja & Saleh Danasasmita, (1981a), *Carita Parahiyangan: Transkripsi, Terjemah-an, dan Catatan*. Bandung: Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa Barat.
- (1981b), *Sanghyang Siksakandang Karesian: Naskah Sunda Kuno Tahun 1518 Masehi*. Bandung: Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa Barat.
- Atja. (1968). *Tjarita Parahijangan: Titilar Karuhun Urang Sunda Abad ka-16 Masehi*. Bandung: Jajasan Kebudayaan Nusalarang.
- Cortesao, Armando. (1944). *The Suma Oriental of Tome Pires*. Vol. I. London: The Hakluyt Society
- Dam, H. Ten. (1957). "Verkenningen rondom Padjadjaran", dalam *Indonesie* 10de Jaargang. Hlm. 290-310.
- Danasasmita, Saleh; Ayatrohaédi; Tien Wartini; Undang A. Darsa, 1(985/1986), *Sewaka Darma (Kropak 408) dan Sanghyang Siksakandang Karesian (Kropak 630): Transkripsi dan Terjemahan*. Bandung: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jenderal Kebudayaan. Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara (Javanologi).
- Darsa, U. Ahmad & Edi S. Ekadjati. (2003). "Fragmen Carita Parahiyangan (Kropak 406)", dalam *Tulak Bala: Sistim Pertahanan Tradisional Masyarakat Sunda dan Kajian Lainnya mengenai Budaya Sunda. Sundalana I*. Bandung: Pusat Studi Sunda

- (1995). *Fragmen Carita Parahyangan dan Carita Parahyangan (Kropak 406): Pengantar dan Transliterasi*. Seri Penerbitan Naskah Sunda Nomor 1. Jakarta: Yayasan Kebudayaan Nusantara. Terbit ulang dalam Seri *Sundalana 1* Tahun 2003. Bandung: Pusat Studi Sunda.
- Darsa, Undang A.; Edi S. Ekadjati; Mamat Ruhimat. (2004). *Darmajati Naskah Lontar Kropak 423: Transliterasi, Rekonstruksi, dan Terjemahan Teks*. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- De Haan, F. (1911). *Priangan (De Preanger-Regentschappen onder het Nederlandsch Bestuur tot 1811)*. Vol. II.
- Djafar, Hasan. (1991). "Prasasti-Prasasti dari masa Kerajaan Sunda, dalam *Seminar Nasional Sastra dan Sejarah Pakwan Pajajaran*, Bogor: Universitas Pakuan bekerjasama dengan Pemda Tk. I Jawa Barat dan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional
- (2011). "Bukti-bukti Arkeologi tentang Eksistensi Kerajaan Sunda", dalam *Dialog Interaktif "Revitalisasi Nilai-nilai Budaya Masyarakat Jawa Barat: Nyusur Galur Mapay Raratan, Ngaguar Warisan Karuhun Urang"*. Bandung: YMSI Cabang Jawa Barat, 20 Mei.
- Djajadiningrat, Hoesein. (1913). *Critische Beschouwing van de Sadjarah Banten*. Haarlem: J. Enschede en Zonen. Terjemahan dalam Bahasa Indonesia: 1983. *Tinjauan Kritis Tentang Sajarah Banten*. Jakarta: Djambatan & KITLV.
- Heukeun, S. J. (1999). *Sumber-Sumber Asli Sejarah Jakarta*. Jilid I. Jakarta: Ciptaloka Caraka.
- Munandar, Agus Aris. (2010). *Tatar Sunda Masa Silam*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra
- Pleyte, C.M. (1911). "Het Jaartal op den Batoe-Toelis nabij Buitenzorg", (*Een Bijdrage tot de Kennis van het Oud Soenda*), *TBG* 53: 155-220.
- (1913). "De Patapaan Adjar Soeka Resi, anders gezegd: de Kluizenarij op den Goenoeng Padang. Tweede bijdrage tot de kennis van het Oude Soenda". *TBG* 55:231-428.
- (1914a). "Een pseudo-Padjadjaransche Kroniek. Derde bijdrage tot de kennis van het oude Soenda". *TBG* 56:257-280.
- Poespoenegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. (1993). *Sejarah Nasional Indonesia*. Jilid II. Jakarta: Balai Pustaka.
- Saptono, Nanang. (2008). "Situs Astana Gede Kawali dalam Konteks Perubahan Budaya", dalam *Dimensi Arkeologi Kawasan Ciamis*. Bandung: Balai Arkeologi Bandung.